

ANTARA PARTAI DAN ORMAS: STUDI PERGESERAN POLITIK SYARIKAT ISLAM PERIODE 1971 - 2004

Safrizal Rambe¹, Utang Suwaryo², Arry Bainus³, Muradi⁴

¹²³⁴Universitas Padjadjaran

Koresponden E-Mail: [safrizal.rambe@yahoo.co.id](mailto:sufrizal.rambe@yahoo.co.id)

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5585

Abstract

Syarikat Islam (SI) is a unique phenomenon in Indonesian history. SI was the first organization to promote Indonesian nationalism, while other organizations were still talking about regionalism. However, in its journey to date, SI has had its ups and downs. In fact, there have been several political shifts from Social Organizations (Ormas) to Political Parties (Pарpol) or from Political Parties to Ormas. In the period from 1971 to 2004, SI has undergone 3 (three) changes, namely from political parties to mass organizations (1973), from mass organizations to political parties (1999), and from political parties to mass organizations (2003). When reviewing the political shifts that occur within the SI body through 3 (three) approaches; From ideology (Frank Distefano), strategy (Maria Spirova), and party figures (Wellhoffer), it is concluded that the political shift that occurred within SI was more dominant in the shift in political strategy, rather than ideology and character..

Kata Kunci : Parties, CSOs, Political Shifts

Abstrak

Syarikat Islam (SI) adalah fenomena unik dalam sejarah Indonesia. SI adalah organisasi pertama yang mengusung nasionalisme ke-Indonesian, disaat organisasi-organisasi lain masih berbicara kedaerahan. Meski demikian, dalam perjalanannya hingga saat ini, SI mengalami pasang surut. Bahkan mengalami beberapa kali pergeseran politik dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Partai Politik (Pарpol) atau dari Pарpol ke Ormas. Dalam rentang waktu dari tahun 1971 sampai dengan 2004, SI telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yaitu dari parpol ke ormas (1973), dari ormas ke parpol (1999), dan dari parpol ke ormas (2003). Ketika mengkaji pergeseran politik yang terjadi dalam tubuh SI dengan melalui 3 (tiga) pendekatan; dari idiologi (Frank Distefano), strategi (Maria Spirova), dan ketokohan partai (Wellhoffer), maka didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa pergeseran politik yang terjadi dalam tubuh SI, lebih dominan adalah pergeseran strategi politik, ketimbang idiologi dan ketokohan.

Kata Kunci : Partai, Organisasi Massa, Pergeseran Politik.

1. Pendahuluan

Hal yang paling mengagumkan dari Syarikat Islam (SI) yang lahir pada tahun 1905 adalah daya tahan organisasi ini dalam melewati rintangan zaman hingga tetap eksis melewati 117 tahun usia

pengabdianannya pada bangsa dan negara. SI adalah fenomena unik dalam sejarah kebangkitan nasionalisme Indonesia. Secara ideologis SI mendahului gagasan nasionalisme yang programatik yang

kelak diungkapkan dalam tuntutan Indonesia merdeka. Dalam hal ini dapat dikatakan ketika organisasi yang lain masih mengedepankan semangat kedaerahan, SI sudah melampaui itu semua dan SI lah cikal bakal organisasi kebangsaan yang ada. Di puncak pertumbuhannya SI mengembangkan “budaya tanding”, mereorganisasi anggotanya untuk menemukan loyalitas dan kesetiiaannya pada organisasi ini dan memutuskannya dari pengaruh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Korver, 1985; Rambe, 2008; 2017; Nasihin, 2012). Apa yang dilakukannya mirip “negara dalam negara”.

Dilihat dari aspek kontinuitas, organisasi ini tetap eksis dan dapat dipastikan SI merupakan perkumpulan sosial politik tertua dan tetap bertahan hingga sekarang. Ia telah melalui tiga zaman, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Dalam periode panjang tersebut SI telah mengalami pergeseran politik. Adakalanya berwujud sebagai partai politik (parpol) dan tampil sebagai salah satu kontestan pemilu di tahun 1955, 1971 dan 1999, namun ada kalanya juga berubah wujud menjadi perkumpulan sosial kemasyarakatan (ormas) seperti yang terlihat dalam kurun waktu pasca pemerintah Orde Baru memberlakukan fusi partai di tahun 1973 dan memasukan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) sebagai salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Umaldi Radi, 1984; Haris, 1991).

Penelitian ini mengkaji pergeseran politik Syarikat Islam Periode 1971-2004 yang setidaknya penulis mencatat ada tiga kali fase pergeseran. *Pertama*, adanya perpindahan bentuk organisasi SI dari semula parpol yang mengikuti Pemilu 1971 kemudian menjadi ormas seiring dengan kebijakan fusi partai yang diberlakukan pemerintah pada tahun 1973. *Kedua*, di awal reformasi SI yang

semula ormas seiring dengan keterbukaan politik kemudian memutuskan untuk kembali mendirikan PSII. *Ketiga*, periode pasca Pemilu 1999 sebagai hasil dari tidak lolosnya PSII dalam memenuhi ketentuan *electoral threshold* 2%, maka dengan sendirinya PSII menjadi *udzur* dan eksistensinya kembali sebagai ormas. Perubahan eksistensi inilah yang dalam penelitian ini penulis sebut sebagai pergeseran politik.

2. Literature Review

Partai politik yang terorganisir muncul pertama kali di Eropa Barat di akhir abad ke 18 dan 19, seperti partai yang berbasis konservatif, liberal dan sosialis. Sebagian lagi muncul di permulaan abad ke 20 seperti Partai Komunis dan Partai Fasis. Ada juga partai yang kemunculannya pasca Perang Dunia ke II seperti Partai Demokratik Kristen Italia. Menurut Durveger kehadiran partai di Eropa Barat didorong oleh pertentangan antara konservatif dengan liberal dan antara sosialis dengan kapitalis (Durveger, 1981: 45). Almond menyebut parpol lahir sebagai upaya kelompok politik di luar kekuasaan untuk bersaing dengan penguasa dalam memperebutkan kekuasaan dan mengendalikan kebijakan pemerintah. Saat itu kelas menengah dan kalangan buruh yang mulai tumbuh mendesak kelas atas dan kalangan aristokrat bagi keikutsertaan mereka dalam pembuatan keputusan. Kelompok yang berkuasa terpaksa mencari dukungan masyarakat agar tetap berkuasa. Karena itu di awal kelahirannya partai dibuat sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintahan, dan pola ini berkembang menjadi fungsi utama parpol (Almond; 1974).

Ketika membicarakan parpol, La Palombara dan Weiner mengatakan partai bukanlah organisasi politik yang

memiliki hubungan terbatas dengan rakyat dan tidak intens dalam membina komunikasi dengan konstituennya di daerah. Sebaliknya parpol menekankan aspek aspirasi rakyat untuk mereka perjuangkan dalam sistem politik (Surbakti, 1992: 114-115). Neumen dan Friedrich selain menerima definisi diatas juga menambahkan aspek lain, yaitu merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka mengatakan parpol didirikan untuk berkuasa yang dengan kekuasaan tersebut maka cita-cita membangun masyarakat dapat terwujud (Miriam, 1998: 16; Surbakti, 1992: 116). Sartori menyoroti perspektif lain yaitu bertindak sebagai mediator atau “organisasi corong” (*channeling organisator*) antara partai sebagai wakil pemerintahan demokratis dan alat masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya (Noor, 2015: 10).

Austin Ranney menjelaskan partai dari sudut karakteristik yang melekat di dalamnya: *Pertama*, berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas. *Kedua*, terdiri dari beberapa orang yang diorganisir dengan sengaja untuk bertindak bersama-sama mencapai tujuan. *Ketiga*, mendapatkan pengakuan masyarakat. *Keempat*, mengembangkan aktivitas dan bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat. *Kelima*, aktivitas inti partai adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik (Ranney, 1990: 223).

Penelitian ini mengkombinasikan semua pendapat para ahli diatas dengan memaksudkan parpol sebagai kelompok orang yang diikat oleh kesamaan keyakinan, ideologi, komitmen dan loyalitas untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengejar kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan melalui jalan demokratis.

Selanjutnya, konsep kedua yang ingin dikemukakan adalah organisasi

masyarakat (ormas). Kemunculan ormas dalam dinamika politik merupakan bagian penting dari proses pembangunan politik, baik di level lokal maupun nasional. Sejalan dengan pandangan Kjell Alliasen, bahwa ormas merupakan salah satu aspek penting yang berimplikasi pada pembangunan negara dan bangsa, khususnya dalam proses *nation building* dan *political development* (Alliasen, 1975:96). Dalam tulisannya Kjell Alliasen melakukan penyelidikan secara empiris terkait masalah-masalah dalam proses pembangunan organisasi politik. Pada konteks ini Kjell menentukan parpol dan Serikat Pekerja sebagai objek penelitiannya. Lokus penelitian Kjell terkait skema pembentukan parpol yang semula berbentuk ormas yang terdapat di Norwegia dan Denmark. Temuan penting dari penelitian Kjell terkait transformasi ormas yang merupakan kelaziman dalam fenomena politik. Bahkan Kjell menegaskan suatu organisasi dapat dianggap berbentuk non politik, namun secara praktis merupakan refleksi dari unsur-unsur yang politis. Merujuk pada temuan tersebut dapat dikatakan ormas dalam bentuk apapun tidak dapat dipisahkan dari perilaku-perilaku politis, khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara (Alliasen, 1975:96).

Transformasi ormas menjadi parpol dinilai sebagai fungsi mobilitas politik serta artikulasi kepentingan. Kedua fungsi tersebutlah yang menjadi landasan utama bagi ormas dalam bertindak secara politis. Kjell juga menambahkan bahwa kedua aspek tersebut yang menjadi faktor utama atas pembentukan sebuah partai yang bermula dari ormas. Secara sederhana faktor tersebut sangat menentukan proses pemenuhan elemen terhadap tahapan pembentukan parpol secara internal.

Ketika membicarakan ormas dan parpol perlu dilakukan identifikasi terhadap elemen dalam struktur dari keduanya, yang tentunya terikat oleh faktor mobilisasi politik, maupun sebagai artikulasi kepentingan. Proses identifikasi elemen ini mungkin saja mendapatkan temuan yang sama antara ormas dan parpol. Beberapa elemen yang perlu diidentifikasi dalam meneliti ormas dan parpol meliputi: *local branches, similar interest of members on local and national level, a national leadership* dan *an organizational bureaucracy* (Alliassen, 1975:98).

Ormas-ormas di Indonesia lahir sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat sendiri akan adanya perkumpulan yang dapat memperjuangkan kepentingannya. Cikal bakal ormas dapat ditelusuri kebelakang hingga ke era kolonialisme Belanda ketika masyarakat mengorganisirnya sebagai alat perjuangan. Dalam hal ini kita dapat menyebut Sarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam dan selanjutnya Partai Sarekat Islam Indonesia. Setelah itu ormas-ormas lain bermunculan seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam dan lain-lain. Ormas-ormas ini menekankan perjuangannya pada sosial keagamaan, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan. Bahkan ormas ini pula yang kemudian menjadi cikal bakal parpol ketika masyarakat membutuhkan perkumpulan politik yang lebih tegas, seperti SI yang menjadi pendahulu dari PSII (Arbi Sanit, 1995:129).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pergeseran politik adalah proses peralihan, perpindahan atau pergantian dari sesuatu (organisasi, perilaku, nilai) menjadi yang lain yang memiliki keterkaitan politik. Dalam konteks SI adalah pergeseran bentuk organisasi dari parpol ke ormas, kemudian menjadi parpol dan berubah

lagi menjadi ormas. SDI yang bertransformasi menjadi SI dan kemudian mengalami pergeseran formal menjadi parpol, merupakan proses pembentukan orientasi yang biasa terjadi dalam praktek berpolitik.

Terkait dengan pergeseran politik, Frank Distefano, menggunakan terminologi *Political Alignment in Parties*. Menurutnya, aspek pergeseran politik yang diselaraskan dengan *alignment*, memuat titik fokus ideologi kepartaian yang tercermin melalui arah orientasi perilaku politik. Secara teoritis, terminologi *alignment* juga banyak disebut *realignment*, atau diartikan secara harfiah sebagai proses penyusunan ulang partai politik atau dengan kata lain idiologi.

Sementara Maria Spirova, menggunakan terminologi pergeseran politik dengan istilah *Party Formation, Persistence, dan Political Parties Change*. Ketiga terminologi kunci tersebut, diartikan sebagai transformasi kelembagaan partai politik. Pandangan Spirova pada dasarnya berfokus pada penentuan perilaku partai politik – khususnya dalam penentuan orientasi tujuan, yang dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi, yakni; tujuan dan ambisi politisi di internal partai, penentuan target elektoral, strategi pra dan pasca pemilihan, sehingga menghasilkan beberapa opsi untuk menentukan arah orientasi partai politik (Strategi). Konsep ini akan digunakan sebagai salah satu variabel identifikasi penelitian untuk mengupas pergeseran politik yang terjadi di tubuh SI, baik sebagai ormas maupun parpol (Maria Spirova, 2007:38).

Sementara Wellhoffer menggunakan terminologi *political shifting* dan *switch of political parties*. Konsep pergeseran politik yang dilihat dari sudut pandang *political shifting* dan *switch political parties*, justru berfokus

pada elemen aktor politisi dan kepemimpinan di tubuh partai politik. (Wellhoffer, 2001:156-187).

Berdasarkan narasi konsep diatas, maka dapat dikatakan bahwa pergeseran politik yang terjadi dalam tubuh SI dapat dikaji paling tidak melalui tiga parameter yaitu: Idiologi, Strategi dan Leader. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada penentuan perilaku parpol-khususnya dalam penentuan orientasi tujuan, yang dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi, yakni; tujuan, dan ambisi politik di internal partai, penentuan target *electoral*, strategi pra dan pasca pemilihan, sehingga menghasilkan beberapa opsi untuk menentukan arah orientasi parpol tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data atau interpretasi data (Cresswell, 2016:4-5). Dalam pandangan yang lain Moleong mengatakan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus (Moleong, 2011:6). Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) dalam pengumpulan data yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dan menjelaskan arti dari

data tersebut atau menginterpretasikan data tersebut seakurat mungkin.

4. Hasil dan Pembahasan ***Pergeseran Politik Syarikat Islam 1971 - 1999***

Pasca peralihan kepemimpinan nasional menyusul peristiwa G30S/PKI, pemerintahan yang baru dibawah Presiden Soeharto mengambil sejumlah langkah guna menciptakan stabilitas politik. Langkah pertama adalah menyelenggarakan Pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh PSII, NU, Parmusi, Perti, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Murba, PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Golkar (Karim,1983: 167). Partai Golkar tampil sebagai peraih suara terbanyak, dan PSII sendiri menduduki urutan kelima dengan meraih 10 kursi di DPR.

Setelah penyelenggaraan Pemilu usai, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai. Ide fusi partai sebelumnya pernah disampaikan Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres XII PNI tahun 1970 di Semarang. Gagasan fusi partai diterima dengan baik oleh berbagai partai. Fusi partai dinyatakan pemerintah Orde Baru penting untuk diambil dalam rangka terciptanya stabilitas politik, sementara stabilitas politik itu sendiri adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang menjadi titik perhatian pemerintah. Banyaknya partai sering dikecam sebagai faktor yang paling signifikan berada dibelakang ketidakstabilan politik.

Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan penggabungan (*fusi*) partai, dari sebelumnya sepuluh partai di Pemilu 1955 yang oleh pemerintah Orde Baru disederhanakan menjadi tiga partai. Partai-partai yang berbasiskan Islam: NU, Parmusi, PSII dan Perti,

dikelompokkan kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian partai yang berbasiskan paham nasionalis (PNI dan IPKI), Kristen (Partai Katholik dan Parkindo) dan sosialis (Murba) dikelompokkan kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara Golkar menjadi kendaraan politik pemerintah dan peraih suara terbesar dalam Pemilu 1971 menjadi kekuatan politik ketiga.

Kebijakan fusi partai, meskipun tujuannya baik, namun kebijakan ini berdampak pada munculnya konflik di tubuh partai baik secara intern maupun ekstern. Sebagai contoh dalam hal ini konflik internal yang dialami PSII dan pada akhirnya PSII terpecah menjadi dua kelompok. Bibit-bibit konflik bermula pada tahun 1972 ketika Syarikat Islam menggelar Majelis Tahkim (MT) ke-32 di Majalaya Kabupaten Bandung. Dalam pemilihan tersebut H. Muhammad Chasan Ibrahim terpilih sebagai Presiden Lajnah Tanfidziah mengalahkan tokoh senior Anwar Tjokroaminoto yang sebelumnya juga telah memimpin PSII, sedangkan untuk Presiden Dewan Pusat terpilih tokoh muda Bustaman. Dengan demikian MT melahirkan kepemimpinan baru dari angkatan muda (Subekti, 2014: 163). Dalam perkembangannya hasil MT tidak sepenuhnya diterima secara luas di kalangan kaum SI, dan bibit-bibit pertikaian mulai muncul. Pihak-pihak yang menentang kepemimpinan baru ini meragukan tokoh-tokoh muda yang masih minim pengalaman dapat membawa PSII kedepan.

Kepemimpinan PSII dibawah Ibrahim dan Bustaman bersikap kritis, bahkan terlihat menolak kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini membuat banyak pihak di internal PSII gusar dan merasa kepemimpinan Ibrahim dan Bustaman membahayakan eksistensi partai. Di tengah gejolak tersebut,

sekelompok anak muda yang menamakan diri “Tim Penyelamat PSII” mengambil alih kepemimpinan partai yang sah dan menyerahkannya kepada Anwar Tjokroaminoto sebagai sesepuh partai yang dianggap mampu menenangkan suasana dan menjembatani PSII dengan pemerintah. Anwar Tjokroaminoto menjadi Ketua Pimpinan Darurat penyusun kepemimpinan partai dan mengganti kepemimpinan dari H. Muhammad Chasan Ibrahim sebagai Presiden Lajnah Tanfidziah dan Bustaman sebagai Presiden Dewan Pusat kepada Anwar Tjokroaminoto sebagai Presiden Lajnah Tanfidziah dan M.A. Gani, sebagai Presiden Dewan Pusat.

Pengangkatan Anwar Tjokroaminoto dan M.A. Gani mengakibatkan terpecahnya kepemimpinan di tubuh PSII. Kepemimpinan partai terbagi menjadi dua. *Pertama*, Pimpinan Darurat di bawah Anwar Tjokroaminoto dan M.A. Gani, yang kemudian menjadi pihak yang didukung oleh pemerintah. *Kedua*, hasil MT ke-33 Majalaya di bawah kepemimpinan H. Muhammad Chasan Ibrahim dan Bustaman. Dampak dari perpecahan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi sampai ke daerah-daerah. Kedua kelompok berjalan masing-masing dalam membina anggotanya.

Pemerintah Orde Baru memanfaatkan kondisi ini dengan mengakui PSII yang lebih akomodatif dan tidak secara frontal mengekspresikan ketidaksetujuannya. PSII di bawah kepemimpinan Ibrahim dan Bustaman dengan tegas menentang fusi tersebut. Pimpinan Pusat PSII justru kemudian mengedarkan Instruksi No. 193 tertanggal 18 Oktober 1972 yang meminta kepada seluruh cabang-cabang PSII untuk tidak menghadiri rapat-rapat yang membicarakan fusi tersebut. Lebih

jauh Pimpinan Pusat juga meminta pengurus cabang yang terlanjur meyetujui fusi partai untuk mengundurkan diri. Sedangkan PSII versi Matraman di bawah Anwar Tjokroaminoto dan M.A. Gani, lebih akomodatif dan berseberangan pemikiran dengan PSII versi Ibrahim dan Bustaman yang kontra dengan kebijakan fusi partai yang diambil pemerintah.

PSII di bawah kepemimpinan Anwar Tjokroaminoto memutuskan berfusi dengan PPP baik di tingkat pusat hingga ke daerah. Perwakilan PSII hasil Pemilu 1971 yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 1972 kemudian di-*recall* dan digantikan oleh tokoh-tokoh dari PSII versi Matraman. Akhirnya tanggal 5 Januari 1973, di Jakarta disepakati pendirian partai dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam konfederasi PPP tersebut terlihat adanya kompromi yang maksimal dari partai-partai yang ada dengan mengacu pada pertimbangan kekuatan yang didasarkan pada hasil pemilu 1971. Kesepakatan tersebut yang populer dengan sebutan “konsensus 1975” nantinya dipakai untuk mendistribusikan kekuatan yang dimiliki partai. Dalam hal ini secara umum dapat dikatakan NU adalah unsur terbesar di PPP dan karena itu posisinya menjadi amat bergengsi dengan duduknya KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai dan KH. Bisri Syamsuri sebagai Ketua Majelis Syuro. Untuk jabatan eksekutif partai dijabat oleh H.M.S. Mintaredja dari Muslimin Indonesia (pengganti Parmusi). Persoalan di sekitar unsur-unsur tersebut nantinya menjadi persoalan yang pelik dan seringkali menjadi sumber konflik yang paling potensial (Haris:1991).

Selama rentang waktu dari tahun 1973 sampai 1999, posisi SI yang resmi diakui pemerintah berada dalam kendali

SI Matraman, dan menjadi salah satu unsur pembentuk PPP. Karena itu konsen kajian ini adalah SI Matraman yang berfusi dalam tubuh PPP, dan PPP menjadi satu-satunya Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dari partai Islam yang mengikuti pemilu tahun 1977 sampai 1997. Sejak fusi tersebut dan ditanggalkannya fungsi politik SI, maka melalui Mukernas Pembangunan di Bogor tahun 1974 diputuskanlah secara resmi PSII berganti nama menjadi SI dan berubah wujud dari sebelumnya partai politik menjadi ormas. Sedangkan untuk aspirasi politiknya, sebagaimana yang telah disepakati dijalankan melalui PPP.

Idiologi SI pada saat pergeseran politik dari partai ke ormas (1973), tidak terlalu mengalami perubahan. Namun ada sedikit perbedaan adaptasi idiologi yang dilakukan oleh Ibrahim dkk, hal ini terlihat dalam pidato kemenangannya dalam MT ke-33, H.M.Ch. Ibrahim mengemukakan “Partai Syarikat Islam kedepan Insya Allah akan lebih maju karena dinasti HOS Tjokroaminoto telah tumbang”. Meskipun demikian, tidak tersirat adanya perubahan idiologi dalam tubuh SI, serta kepemimpinan Ibrahim hanya beberapa saat, karena diambil alih oleh Tim Penyelamat SI, dan kemudian diserahkan kembali kepada Anwar Tjokroaminoto yang merupakan bagian dari dinasti HOS Tjokroaminoto, sehingga idiologi SI semenjak dicanangkan oleh Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto dapat dikembalikan. Disamping itu, fusi SI kedalam PPP juga tidak merubah idiologi SI, sebab marwah SI dapat dipertahankan melalui Ormas SI, hal ini bisa terjadi karena partai-partai yang bergabung dalam PPP, tetap mempertahankan idiologi dan identitas organisasinya, meskipun mengalami perubahan bentuk dari Parpol ke Ormas.

Pergeseran politik pada tahun 1973, lebih condong merupakan pergeseran strategi, hal ini terlihat ketika

PSII bersedia berfusi dalam PPP dengan menerapkan strategi kooperatif, demi menyelamatkan SI dari kemungkinan dibubarkan oleh pemerintah, pilihan ini adalah pilihan minimax (*minimizing the maximum possible loss*). Dengan perubahan dari PSII ke SI, sekaligus mengukuhkan orientasi partai, melalui 2 (dua) bentuk organisasi. Orientasi politik SI dititipkan melalui Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan orientasi non-politik (sosial, keagamaan dan sebagainya) dijalankan oleh Ormas Syarikat Islam. Hal ini ditegaskan oleh KH. Mulyana “yang berfusi itu hanya fungsi politik saja sementara eksistensi keorganisasiannya tetap hidup sebagai Organisasi Massa Syarikat Islam”.

Dalam tataran pergeseran ketokohan SI, saat pergeseran politik dari tahun 1971-1973, tokoh yang berada dibalik pergeseran tersebut adalah Anwar Tjokroaminoto (1909-1975). Beliau adalah putra dari HOS Tjokroaminoto, dan merupakan seorang politisi dan jurnalis Indonesia. Anwar menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Wilopo selama setahun dan juga merupakan Perdana Menteri Negara Pasundan selama kurang dari sebulan pada tahun 1950. Beliau yang mewarisi kepemimpinan SI dalam waktu yang cukup lama. Selama kepemimpinannya dalam SI, melahirkan beberapa tokoh muda, meski pada akhirnya ada yang menjadi penerusnya, ada pula yang menjadi penentangannya, mereka adalah H.M.Ch. Ibrahim, MA. Gani, Thayeb Gobel, Syarifuddin Harahap. Dengan melihat dinamika interaksi politik diantara elite politik PSII itu, tokoh-tokoh SI dikelompokkan menjadi dua kelompok besar diatas. Kelompok pertama, disebut kelompok “pragmatis” diantaranya TM. Gobel, Barlianta Harahap dan Syarifuddin Harahap, serta kelompok kedua, disebut “normatif prinsip”, terdiri dari Bustaman, HMCh

Ibrahim, MA. Gani, Muchtar Ali dan Zubaidah Muchtar.

Pergeseran Politik dari Ormas ke Parpol (1998-2003)

Begitu rezim Orde Baru jatuh dan kekuasaan berpindah dari Soeharto ke wakilnya B.J. Habibie, perubahan pertama yang paling terasa adalah format sistem kepartaian Indonesia. Rakyat berduyun-duyun membentuk partai sebagai antithesa atas pengelolaan negara yang otoriter dan pelaksanaan demokrasi yang “seolah-olah”. Kekuasaan negara dikelola secara sentralistik dengan dukungan militer dan mesin politiknya Golkar, yang tidak memberikan ruang bagi munculnya partisipasi politik masyarakat secara luas. Karena itu begitu kekuasaan Orde Baru ambruk maka seketika itu pula ledakan partisipasi politik rakyat menemukan jalan keluarnya.

Habibie dalam menjawab tuntutan rakyat membuat sejumlah kebijakan yang dinilai sejalan dengan semangat reformasi. Beberapa kebijakan politiknya memperlihatkan komitmen pada perubahan. Di zaman Habibie inilah beberapa sendi demokrasi diletakkan seperti penggantian lima paket undang-undang politik yang selama ini merupakan tulang punggung rezim Orde Baru, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, penghapusan azas tunggal dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), perluasan otonomi daerah, komitmennya untuk menyelenggarakan pemilu yang dipercepat dan yang paling kontroversial dan banyak di kritik orang adalah, keberaniannya untuk menantang pendapat umum rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan RI atau merdeka.

Disamping itu bagi aktivis-aktivis politik anjuran Habibie pada Mei 1999 agar masyarakat dapat mendirikan partai

politik sebagai salah satu cara untuk mendemokratisasikan perpolitikan nasional, disambut dengan antusias. Sejak itulah partai politik ramai bermunculan melebihi apa yang dipikirkan oleh kalangan aktivis politik sebelumnya. Era ini menandai berakhirnya sistem kepartaian seperti yang kita kenal di masa Orde Baru untuk digantikan dengan sistem multi partai. Ini adalah eksperimen kedua bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan sistem multi partai. Kalau dulu saat Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat No X berisi anjuran agar masyarakat mendirikan partai politik, maka Habibie melakukannya demi untuk menjawab tuntutan reformasi.

Dengan kondisi itu, Syarikat Islam pun berjuang dalam membangun eksistensinya di jalur politik dengan mengikuti Pemilu tahun 1999. Syarikat Islam dibawah kepemimpinan Taufik Rusjdi Tjokroaminoto kemudian mendirikan PSII dan berhasil lolos sebagai peserta pemilu 1999, sementara ormasnya sendiri juga tetap hidup karena memang tidak dibubarkan. SI Matraman melalui Majelis Tahkim ke-37 tahun 1999 di Bekasi kemudian memutuskan selain ada PSII namun SI sebagai ormas juga dinyatakan tetap ada. Eksistensi ormas SI dinilai penting untuk menaungi kader-kader SI yang bernaung dibawah PPP atau partai-partai yang lain. MT kemudian memilih Amrullah Ahmad sebagai Ketua LT DPP Syarikat Islam dan Prof. Drs. Djaja Saefullah, MA, Ph.D menjadi Ketua Dewan Syarikat Islam 1999-2004 (Valina, 2017:326).

Namun dalam pandangan Djaja Saefullah reformasi juga telah memunculkan kaum oportunistis di tubuh SI. Selain adanya orang yang tidak jelas asal-usulnya, juga ada yang ikut dalam partai politik di luar PSII, tetapi ingin menjadi pengurus PSII. PSII sendiri

pada akhirnya menjadi salah satu partai peserta Pemilu 1999, dengan Ketua Umum masih dari keluarga Tjokroaminoto, yaitu Taufik R. Tjokroaminoto (Djaja Saefullah, 2006:11). Penyelenggara pemilu kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih independen dibandingkan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dikontrol pemerintah Orde Baru. KPU beranggotakan wakil-wakil dari partai politik itu sendiri, disamping wakil dari pemerintah. Untuk mempercepat pemilu terlaksana syarat-syarat yang diberlakukan diperlonggar oleh UU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 82 aturan peralihan UU No. 3 Tahun 1999 yang mensyaratkan: a) memiliki kepengurusan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. b) memiliki pengurus di setengah jumlah kabupaten/kota madya di provinsi sebagaimana yang dimaksud huruf a. Ketua KPU terpilih adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Rudini, sedangkan Panitia Pelaksana Pemilu (PPI) diketuai Jacob Tobing, politisi PDIP yang mantan pengurus Partai Golkar.

Pemilu yang digelar dengan tergesa-gesa di bawah bayang-bayang konflik akhirnya terselenggara juga dengan aman dan lancar. Dalam hal ini ternyata pemerintahan Presiden Habibie yang awalnya dihujat, justru sukses mengantarkan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu demokratis pertama setelah 44 tahun lalu pemilu demokratis yang sama digelar (1955). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu kali ini dianggap sebagai kemajuan dan indikasi bahwa Indonesia sedang melangkah ke fase berikutnya, yaitu era demokratisasi pasca ditinggalkannya era otoriterian.

Hasil pemilu memperlihatkan lima partai besar mendominasi 417 kursi atau 90,26% dari 462 kursi yang

diperebutkan, yaitu; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 35.689.073 suara atau 33,7% dengan 153 kursi ditambah 1 kursi hasil *stembus accord* (penggabungan sisa suara); Golongan Karya (Golkar), di urutan kedua dengan mengantongi 23.741.758 suara atau 22,4% dengan perolehan 120 kursi; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga dengan perolehan 13.336.982 suara atau 12,61% dengan 51 kursi; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 11.329.905 suara atau 10,71% dengan perolehan 58 kursi ditambah 1 kursi hasil *stembus accord*; dan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 7.528.956 suara atau 7,12% dengan memperoleh kursi sebanyak 31 ditambah 1 kursi hasil *stembus accord* (Rambe, 2009:52-55).

Sedangkan bagi PSII, Pemilu tahun 1999 ini cukup mengecewakan karena hanya menduduki urutan ke-15, dengan raihan suara 375.920 atau 0,36 % pemilih dengan hanya meraih 1 kursi di DPR. Sebagai konsekwensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, setiap parpol yang tidak memenuhi batas minimal *electoral threshold* 2% dari total suara sah yang masuk, maka untuk pemilu selanjutnya tidak diperbolehkan ikut (Rambe, 2009: 77). Hal ini ditenggarai karena diaspora partai politik Islam, Syarikat Islam sebagai organisasi yang banyak dihuni kalangan muslim progresif moderat tidak mampu bertahan. Reformasi sebagai titik ekstrem politik Islam menemukan momentumnya kembali setelah dilarang selama Orde Baru. Akan tetapi resikonya terjadi perebutan suara di antara partai-partai Islam, dan PSII kalah bersaing. Hal itu dibuktikan dengan PSII yang tidak dapat mengikuti Pemilu 2004 dikarenakan perolehan suaranya tidak memenuhi batas minimal (*threshold*)

(Bilveer Singh dan Zuly Qodir, 2015: 349-350).

Dilihat dari sisi idiologi, pergeseran politik pada tahun 1998, menurut pandangan Barna Soemantri, tidak mengalami perubahan idiologi. Karena Program Azaz dan Program Tandhim yang dibuat HOS Tjokroaminoto di tahun 1917 sudah final sebagai idiologi. Pergeseran politik lebih banyak di tataran strategi, apakah perjuangan harus melalui ormas atau partai politik, tergantung dalam situasi dan kondisi yang bagaimana SI memerlukan kendaraan perjuangan tersebut diantara keduanya atau bahkan bisa saja hadir bersamaan di kurun waktu yang bersamaan. Hal senada dikemukakan oleh KH. Mulyana yang menguatkan bahwa bagi kaum SI, apa yang telah ditetapkan dalam Program Azaz dan Program Tandhim, harus dijalankan. Maka pergeseran politik SI dari Ormas menjadi partai politik pada tahun 1998-1999, bukan pergeseran idiologi, namun lebih pada tataran strategi.

Pergeseran politik yang dialami pada tahun 1999, lebih banyak adalah perubahan strategi SI dalam mengusung dan memperjuangkan idiologi, ditengah perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut adalah tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, korup, kolusi, nepotisme, dan mengedepankan kroniisme, menuju arah pemerintahan baru yang mengedepankan demokrasi, HAM dan *political equality*. Rezim pengganti dibawah pimpinan B.J. Habibie, berupaya untuk mengakomodir tuntutan reformasi yang disuarakan rakyat. SI memanfaatkan situasi dengan merubah orientasi politiknya, dari awalnya sebagai Ormas bagian dari PPP menjadi Parpol yang terpisah dari PPP.

Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh teologis, historis, sosiologis, dan

faktor reformasi. *Pertama*, faktor teologis. Dalam pandangan SI, agama merupakan suatu yang *integrated*, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah *din wa daulah*, berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. *Kedua*, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang. Dengan jumlah yang mayoritas tersebut sudah sepiutnya dalam upaya penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai dan perjuangan Islam. *Ketiga*, faktor historis. Dalam sejarah Indonesia SI merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah, dan memiliki anggota terbanyak di antara organisasi-organisasi pergerakan lainnya. *Keempat*, faktor reformasi. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru melahirkan era kebebasan. Dalam era ini setiap kelompok atau golongan diberi kesempatan untuk menyalurkan atau membentuk partai politik sesuai asas dan aspirasi politiknya. Kesempatan ini tidak disiasikan oleh para elite politik SI untuk mendirikan partai politik.

Berbarengan dengan pembentukan PSII, Ormas SI sendiri masih tetap dihidupkan, untuk mengakomodir warga SI yang menetapkan pilihan politiknya ke partai lain, terutama yang sudah betah di PPP, serta yang orientasi tidak mau terlibat dalam urusan politik praktis. Dengan demikian, pergeseran politik yang terjadi dalam tubuh SI, lebih banyak di tataran strategi, apakah perjuangan harus melalui ormas atau partai politik, tergantung dalam situasi dan kondisi yang bagaimana SI

memerlukan kendaraan perjuangan tersebut diantara keduanya atau bahkan bisa saja hadir bersamaan di kurun waktu yang bersamaan.

Dalam pergeseran politik tahun 1998, tokoh yang ada dibalik itu adalah Taufik Rusjdi Tjokroaminoto, cucu dari HOS Tjokroaminoto, dan putra dari Anwar Tjokroaminoto. Kepemimpinan Taufik Rusjdi Tjokroaminoto sudah berlangsung sejak tahun 1990, menggantikan pamannya, Harsono Tjokroaminoto, setelah Harsono memimpin PSII dalam mengkonsolidasikan SI sepeninggal Anwar Tjokroaminoto. Dengan demikian warna keluarga Tjokroaminoto dalam kepemimpinan SI masih terus berlangsung, sehingga SI masih tetap mempertahankan ideologi partai yang telah ditetapkan oleh masa kepemimpinan HOS Tjokroaminoto.

Pergeseran Politik dari Parpol ke Ormas (2001-2004)

Setelah mengalami kekalahan dalam pemilu 1999 dan terganjal mengikuti pemilu selanjutnya (2014), maka PSII mencoba untuk mengevaluasi serta menentukan langkahnya kedepan. Dalam Majelis Tahkim PSII yang diselenggarakan di Jakarta pada 5-8 Juli 2002 diisyaratkan agar DPP PSII mengambil langkah-langkah guna menselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, demi tetap tersalurkannya aspirasi kaum SI dalam pemilu berikutnya. Dalam plenonya DPP PSII mempertimbangkan kondisi dan peluang yang ada untuk turut serta dalam kontestasi Pemilu tahun 2004.

Pengurus PSII yang tetap ingin berpolitik praktis kemudian berhasil menghimpun 8 (delapan) partai yang tidak lolos *electoral treshold*, untuk membentuk aliansi membentuk partai politik baru, agar bisa turut berkontestasi

dalam Pemilu 2004. Aliansi yang dibangun memperhatikan kesamaan cita-cita PSII dengan partai-partai lain yang berkoalisi. Akhirnya setelah melakukan pembicaraan secara mendalam kedelapan partai untuk bersepakat bergabung dan membentuk partai baru yang dinamakan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang dideklarasikan di Surabaya pada 17 Desember 2002. Terpilih sebagai Ketua Umum adalah Ketua Umum PSII, Rahardjo Tjakraningrat. Penggabungan delapan partai ke PSI relatif berjalan mulus tanpa banyak hambatan.

Sementara kelompok yang pesimistis akan sepak terjang Partai Sarikat Indonesia yang tidak lagi berorientasi SI, kemudian menyelenggarakan Majelis Tahkim ke-35 di Garut tahun 2003. Kongres tersebut memutuskan PSII beralih kembali menjadi ormas. Sehingga ada pergeseran politik kembalinya SI menjadi ormas SI, dan PSII yang berkontestasi dalam Pemilu 1999, dinyatakan uzur dan kembali diintegrasikan kedalam ormas SI.

Pada tahun 2003, pergeseran politik SI dari parpol ke ormas, juga tidak mengalami pergeseran di bidang ideologi. Secara keseluruhan ideologi SI masih tetap dipertahankan, sekalipun sarana perjuangan kaum SI berubah kembali dari bentuk partai menjadi hanya sebuah ormas. Meskipun demikian, ideologi partai sempat akan mengalami pergeseran kearah lebih nasionalis, ketika kelompok muda di Matraman yang tidak setuju dengan Amrullah sebagai Ketua PSII hasil kongres Lembang kemudian menggelar Kongres LB PSII di awal tahun 2002 yang memilih Rahardjo Tjakraningrat di Kongres LB PSII di Pondok Gede. Pergeseran ini terjadi karena PSII tidak lolos *electoral threshold* 2%, sehingga kalau ingin menjadi kontestan Pemilu

2004, harus melebur ideologi kearah nasionalis, karena mengakomodir partai-partai lain yang diluar ideologi Islam.

Sementara pergeseran politik SI di tahun 2003, lebih cenderung merupakan pergeseran strategi. Hal ini tidak terlepas dari perubahan regulasi Pemilu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa partai politik bisa mengikuti pemilu berikutnya bila melewati ambang batas *electoral threshold* 2% dari total perolehan suara sah nasional di pemilu 1999. Mensikapi Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 ini, SI kemudian mengambil pilihan merubah bentuk dari partai ke Ormas melalui Majelis Tahkim (kongres nasional) ke-35 di Garut tahun 2003, dan kemudian menyatakan PSII nya uzur.

Berkaitan dengan pergeseran ketokohan di tubuh SI pasca Pemilu 1999, sepeninggal Taufik Rusjdi Tjokroaminoto di tahun 2010, maka yang menjadi Pj. Ketua PSII adalah Rusdi Kosim, dan selanjutnya pada tahun yang sama, diselenggarakan Kongres PSII di Lembang, dan terpilih menjadi Ketua Umum PSII selanjutnya adalah Amrullah, sebelumnya menjabat sebagai Ketua SI. Sedangkan PSII yang dipegang Amrullah tidak berjalan dan uzur, sampai akhirnya melalui MT tahun 2003, SI kembali menjadi Ormas. Seiring dengan itu, kepemimpinan keluarga Tjokroaminoto pun berakhir.

5. Kesimpulan

Pergeseran Politik dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 terjadi dalam tiga fase. *Pertama*, dari tahun 1971 ke tahun 1973, fase dimana PSII sebagai partai yang menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu 1971, bergeser menjadi Ormas pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seiring dengan kebijakan fusi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. *Kedua*, pada

masa reformasi tahun 1998, SI kembali bergeser menjadi partai, dan berubah wujud menjadi PSII, dan menjadi peserta Pemilu 1999. *Ketiga*, pasca kekalahan dalam Pemilu tahun 1999, pada tahun 2003, SI berubah kembali menjadi Ormas. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : Idiologi, Strategi, dan Ketokohan atau Kepemimpinan Partai. Dari hasil analisa yang dilakukan, maka dapat disimpulkan :

Pertama, Dari ketiga periode pergeseran politik yang terjadi dalam tubuh SI, secara ideologis tidak mengalami pergeseran, namun pada periode tahun 1973 sempat mengalami perbedaan adaptasi terhadap ideologi, ketika kepemimpinan PSII beralih kepada H.M.Ch. Ibrahim, namun kemudian kepemimpinan kembali ke tangan dinasti Tjokroaminoto (Anwar Tjokroaminoto), sehingga SI kembali ke khittahnya. Pada saat kepemimpinan kembali ke Anwar Tjokroaminoto, ada sedikit pergeseran orientasi, mengingat adanya tekanan dari pemerintah Orde Baru untuk melakukan fusi, sehingga kemudian orientasi politik SI dititipkan melalui PPP sedangkan yang sifatnya non-politik dikelola oleh Ormas SI. Dalam periode ini kepentingan SI diwadahi oleh dua lembaga, yaitu Parpol (PPP) dan Ormas (SI). Pada periode tahun 1998-pun, tidak terjadi pergeseran ideologi, karena *Program Azaz* dan *Program Tandhim* yang dirumuskan HOS Tjokroaminoto di tahun 1973 sudah final sebagai ideologi. Begitu pula pada tahun 2003, secara keseluruhan ideologi SI masih tetap dipertahankan, sekalipun sarana perjuangan kaum SI berubah dari bentuk partai (PSII) menjadi Ormas (SI).

Kedua, Pergeseran politik dalam tubuh SI dalam ketiga periode diatas sangat terlihat pada tataran strategi. Pada periode tahun 1973, Sarikat Islam yang

pada saat itu berbentuk partai politik (PSII) sama dengan partai-partai lain, dipaksa untuk mengintegrasikan kepentingan politiknya melalui fusi. Hal ini menyebabkan langkah strategis yang dilakukan oleh SI adalah dengan mengambil langkah yang berbeda dengan strategi yang dilakukan sebelumnya, ketika masih menjadi partai-politik. Langkah tersebut adalah dengan menerapkan strategi kooperatif (fusi), serta Strategi standard ganda, dengan cara membagi dua orientasi, yaitu orientasi politik SI dititipkan melalui PPP, sedangkan orientasi non-politik dijalankan oleh Ormas SI. Sementara pada tahun 1999, strategi yang dilakukan oleh SI adalah menarik kembali orientasi politik SI, yang selama Orde Baru dititipkan di PPP, dikembalikan ke PSII, meskipun PSII tidak sebesar sebelumnya, sebab kesepakatan pimpinan SI, bahwa PSII dijadikan kendaraan politik kaum SI, namun tetap mempertahankan Ormas SI mengingat kaum SI sudah terpolarisasi kedalam ke berbagai partai di masa Orde Baru, terutama di PPP dan ada juga yang berpindah ke Partai Golkar, serta mereka yang jenuh berpolitik praktis. Sehingga dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh SI adalah merubah orientasi politiknya, dari Ormas yang menjadi sayap partai PPP, menjadi parpol mandiri yang berorientasi pada *Program Azaz* dan *Program Tandhim* yang dirumuskan HOS Tjokroaminoto (PSII), namun Ormasnya sendiri tidak lebur utuh, sehingga kepemimpinan SI ada dua, yaitu PSII dan SI.

Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi. Sedangkan pergeseran politik yang terjadi pada tahun 2003, lebih dipaksa oleh keadaan, karena PSII tidak bisa melewati ambang batas *electoral threshold* 2% dari total perolehan suara sah nasional di pemilu 1999. Dengan

kondisi tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan pergeseran strategi dari Parpol (PSII) ke Ormas (SI). Namun meskipun keputusan MT menyatakan sikap kembali ke Ormas SI dan juga menyatakan bahwa PSII dinyatakan udzur, masih ada rasa kepenasaranan diantara kaum SI untuk terjun ke dunia politik praktis, sehingga kemudian menjadi lokomotif berdirinya Partai Sarikat Indonesia (PSI), bersama dengan Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis), PNI Massa Marhaen, Partai Persatuan (PP), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dengan diketuai oleh Ketua Umum PSII sebelum dinyatakan udzur, Rahardjo Tjakraningrat. Akan tetapi, PSI tidak mencerminkan idiologi SI, karena lebih berwatak nasionalis keIndonesiaan. Selanjutnya pasca Pemilu 2004, dimana PSI pun tidak lolos *electoral threshold* 2%, orientasi politik SI benar-benar habis, dan sekarang lebih berkonsentrasi pada SI sebagai Ormas.

Ketiga, Pergeseran politik dalam tubuh SI dalam tiga periode pergeseran, dilihat dari ketokohan atau kepemimpinan partai, di 2 (dua) periode awal (1973 dan 1998), masih didominasi oleh klan Tjokroaminoto. Pergeseran politik SI pada tahun 1973, dari partai politik (PSII) menjadi Ormas (SI), berada pada saat Anwar Tjokroaminoto memegang kepemimpinan sebagai Ketua LT. Karena itu, idiosinkretik Anwar Tjokroaminoto sangat mewarnai organisasi SI. Meskipun saat Majelis Tahkim ke-33 di Majalaya, 23-29 Juli 1972, sempat terjadi peralihan kepemimpinan ke tokoh-tokoh muda, H.M.Ch. Ibrahim dan Bustaman, SH, namun kepemimpinan kembali lagi ke Anwar Tjokroaminoto, ketika Team Penyelamat Kaum PSII, mengambil alih

kepemimpinan PSII dari tangan Ibrahim-Bustaman, pada tanggal 22 Desember 1972, dan menyerahkannya pada Anwar Tjokroaminoto, dengan tujuan untuk menyelamatkan kaum PSII dari kemungkinan yang paling buruk yaitu dibubarkan, karena H.M.Ch. Ibrahim dan Bustaman, SH, memperlihatkan sikap menentang pemerintah dalam usaha menyederhanakan jumlah partai-partai politik yang ada di Indonesia. Disinilah ketokohan seorang Anwar Tjokroaminoto dipertaruhkan. Sikap akomodatif Anwar Tjokroaminoto dengan menerima keputusan fusi kedalam tubuh PPP, telah menyelamatkan SI dari kemungkinan tenggelam dari peredaran, sehingga tidak mampu menyuarakan idiologi kaum SI. Dalam pergeseran politik tahun 1998, tokoh yang ada dibalik itu adalah Taufik Rusjdi Tjokroaminoto, cucu dari HOS Tjokroaminoto, dan putra dari Anwar Tjokroaminoto. Kepemimpinan Taufik Rusjdi Tjokroaminoto sudah berlangsung sejak tahun 1990, menggantikan pamannya, Harsono Tjokroaminoto. Dengan demikian warna keluarga Tjokroaminoto dalam kepemimpinan SI masih terus berlangsung, sehingga SI masih tetap mempertahankan idiologi partai yang telah ditetapkan sejak masa kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, meskipun pada saat itu SI harus membelah diri di satu sisi SI sebagai ormas dan di sisi yang lain PSII.

Sedangkan pergeseran politik pada tahun 2003, terjadi disaat kepemimpinan PSII dipegang oleh Rahardjo Tjakraningrat. Rahardjo Tjakraningrat, bukan anggota tradisional kaum SI. Keterlibatan Rahardjo Tjakraningrat dalam kepemimpinan SI, pada awalnya diajak serta oleh Taufik Rusjdi Tjokroaminoto, dan kemudian pada Kongres LB PSII di Pondok Gede, terpilih menjadi Ketua Umum. Namun

kepemimpinan Rahardjo di PSII tidak pada waktu yang tepat, sebab PSII pada pemilu sebelumnya (1999) tidak lolos *electoral threshold* 2%, maka jika ingin kembali turut serta dalam pemilu harus bergabung dengan partai lain, yang secara otomatis menanggalkan ideologi partai, dan lebih mengedepankan strategi pencapaian politik. Maka kemudian PSII bergabung dengan 8 partai lain membentuk PSI, dan disisi lain Ormas SI dalam Majelis Taklim (kongres nasional) ke-35 di Garut tahun 2003, menetapkan PSII dalam posisi udzur. Dengan demikian PSI tidak lagi merepresentasikan kaum SI.

Dengan demikian pergeseran politik SI dalam tiga periode yang menjadi objek penelitian, yaitu tahun 1973 (pergeseran dari partai politik ke Ormas), tahun 1999 (perubahan politik dari Ormas ke Parpol), dan 2003 (pergeseran politik dari Perpol ke Ormas) yang dominan adalah pergeseran strategi dalam menyelamatkan ideologi perjuangan SI ditengah perubahan politik yang terjadi dalam kancah politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Almond, Gabriel dalam Mohtar Mas`oed dan Colin Mac Andrews. 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bilveer Singh dan Zuly Qodir. 2015. *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John. Penelitian Kualitatif dan Disain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Distefano, Frank J. 2019. *The next realignment: why America's parties are crumbling and what happens next*. Amherst, New York: Prometheus Books.
- Duverger, Maurice. 1981. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, (terjemahan). Jakarta: Bina Aksara.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta: Alfabeta.
- Haris, Syamsuddin. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Ian Douglas Wilson. 2021. *Politik Jatah Preman : Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia*. Jogjakarta : Margin Kiri.
- Kathleen Bawn, Martin Cohen, David Karol, Seth Masket, Hans Noel, and John Zaller. 2012. *A Theory of Political Parties: Groups, Policy Demands and Nominations in American Politics*. Articles | A Theory of Political Parties, September 2012 | Vol. 10/No. 3.
- Korver, A.P.E. 1985. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*, (terjemahan) Jakarta: Grafiti Press.
- Nasihin, 2012. *Sarekat Islam Mencari Ideologi, 1924-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. *Partai-Partai Islam di Pentas Politik Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti, 1987.
- 1994. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Radi, Umaid. 1984. *Strategi Partai Persatuan Pembangunan 1973-1982*. Jakarta: Integrita.
- Rambe, Safrizal. 2008. *Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia.
- 2009. *Berjuang Untuk Rakyat, Partai Sarikat Indonesia, Sejarah, Ideologi, dan*

- Perjuangannya Dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009*. Jakarta: Pustaka Bina Imtaq.
- Ranney, Austin. 1990. *Governing: an Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Singka, Valina. 2014. *Partai Syarikat Islam Indonesia, Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elit*. Jakarta: Obor.
- 2017. Prolonged Elit Conflict and Destruction of the Indonesian Islamic Union Party (PSII). *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 24, No. 2 Tahun 2017.
- Soemantri, H. Barna. 2010. *Nilai-nilai Juang Syarikat Islam (Sebuah Catatan)*. 12-05-2010.
gal 25 Februari 2022 di Bandung
- Spirova, Maria. 2007. *Political Parties in Post-Communist Societies*. New York: Palgrave MacMillan
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Wellhofer, E. Spencer. 1972. *A Study of Organizational Dynamics*. *Journal of Politics*. Vol. 34 (11). hlm. 153-182.

Wawancara

- Wawancara dengan KH. Mulyana tanggal 25 Februari 2022 di Garut
- Wawancara dengan Barna Soemantri tang